

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDARABAH DI
BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi
Strata I pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama
Islam**

Oleh:

LALU ILHAM AKBAR SYAFI'I
I000140016

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT KUBE COLOMADU
SEJAHTERA**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

Lalu Ilham Akbar Syafi'i

1 000 140 016

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Harun', with a large, stylized initial 'H' and a long horizontal stroke extending to the right.

Drs. Harun, MH.

NIK 343

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA**

OLEH
LALU ILHAM AKBAR SYAFI'I
I000140016

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari 05 November 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

- 1. Drs. Harun, M.H.**
Ketua Dewan Penguji
- 2. Azhar Alam, S.E., Lc., M.SEI**
Anggota I Dewan Penguji
- 3. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.**
Anggota II Dewan Penguji

()
()
()



Dekan,

Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.

NIDN.0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Naskah Publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di atas, maka saya akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 04 November 2019

Penulis



LALU ILHAM AKBAR SYAFI'I

NIM: I000140016

NIRM: 14/X/02.1.2/0032

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DI BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA

Abstrak

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penerapan pembiayaan mudharabah di BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA. Sehingga, tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui tahapan dan proses pihak BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA dalam menjalankan akad mudharabahnya. Untuk mencapai tujuan itu, peneliti dalam hal ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang menjadi sumber adalah BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut, bahwa tahapan dan proses yang dilakukan BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA dalam proses pembiayaan mudharabah sudah sesuai dengan aturan hukum islam yang dalam hal ini berdasar pada DSN MUI.

Kata kunci: mudharabah, BMT

Abstract

The problem examined in this study is about how Islamic law reviews the application of mudharabah financing in BMT KUBE COLOMADU PROSPEROUS. So, the purpose of this research is to know the stages and processes of BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA parties in carrying out their mudharabah agreement. To achieve this goal, researchers in this case use field research (*field research*) with methods of data collection by means of interviews, documentation, and observation. The data that becomes the source is BMT KUBE COLOMADU PROSPEROUS. The data analysis is done by using descriptive qualitative methods, namely describing and analyzing the problems raised. From the research that has been done, the following results are obtained, that the stages and processes carried out by BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA in the mudharabah financing process are in accordance with Islamic legal rules which are based on the MUI DSN.

Keywords: mudharabah, BMT

1. PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan permasalahan kehidupan yang sering didiskusikan sebagian besar masyarakat. Ekonomi yang hadir dan terus mengalami perkembangan pesat sejak dua dekade terakhir adalah sistem ekonomi islam dan

juga menjelma menjadi *trend center*. Ekonomi islam pada masa sekarang sangat digandrungi oleh para pakar ekonomi. Mereka menyebut ekonomi islam sebagai ekonomi alternatif, yaitu suatu gubahan baru pada dunia ekonomi yang berbasis atau ber manajemen syariah. Sistem Ekonomi islam mempunyai tujuan dan sasaran yang bersifat jangka Panjang, menengah dan pendek guna mewujudkan adanya peningkatan kesejahteraan bagi umat manusia, sehingga tentunya diperlukan adanya solusi yang tepat guna menunjang tujuan tersebut. Dengan demikian sistem ekonomi islam diharapkan menjadi salah satu alternatif terbaik dalam meraih kesejahteraan bagi masyarakat.¹

Pada tahun 1998, terjadi krisis moneter yang melanda beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Banyak perbankan di Indonesia yang merasakan dampak dari krisis tersebut hingga mengalami kebangkrutan, lain halnya dengan bank yang bersystem Syariah, bisa bertahan di tengah gejolak krisis ekonomi di kala itu. Sejak kasus itu, di Indonesia muncul banyak gagasan untuk pembuatan perbankan dan lembaga keuangan yang bersistem syariah,. Dalam perkembangannya, telah banyak berdiri perbankan maupun Lembaga keuangan Syariah yang berskala besar maupun yang kecil. BMT (Baitul maal waa tamwil) merupakan salah satu contoh bentuk Lembaga keuangan Syariah (LKS) yang berskala kecil atau mikro. Keberadaan BMT ini sangat membantu bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat terpencil.

Kehadiran BMT dengan bebrbagai produk akadnya telah mampu memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan perekonomian masyarakat, dan juga bisa lebih memperkenalkan ekonomi islam kepada msyarakat luas. Kendati demikian terdapat juga beberapa BMT yang dalam pelaksanaan akadnya tidak sesuai dengan aturan yang semestinya, aturan yang telah ditetapkan oleh pihak DSN MUI terkait pelaksanaan di bidang ekonomi syariah. Terutama pada pelaksanaan akad mudharabah, terdapat beberapa

¹Heri Sudarsono, *bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2013, hal, 13

penyelewengan yang di lakukan oleh BMT tertentu dalam teknis penerapan akad mudharabah tersebut.

Dari permasalahan yang diangkat penulis sesuai dengan masalah dan ide di atas, penulis ingin mengkaji dan meneliti penerapan akad mudharabah yang ada di BMT KCS yang ditinjau dari sudut pandang hukum islam.

2. METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) agar bisa mendapatkan data yang lengkap, data tersebut akan dihasilkan dari pengamatan penulis pada proses kerja di BMT KCS. Penulisan penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, dimana penulis akan mengulas proses pembiayaan akad mudharabah yang diterapkan oleh BMT KCS. Kemudian menganalisa pokok permasalahan yang telah di kemukakan dengan ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam, dengan tujuan mengetahui status dan kesesuaiannya dengan hukum islam. Pendekatan normative ialah pendekatan yang akan di pergunakan dalam penelitian ini, dengan cara meneliti korelasi antara norma-norma hukum islam dan pelaksanaan yang menyangkut tentang objek penelitian dengan kaidah fikih yang berlaku.

Data primer, merupakan data utama yang penulis dapatkan secara langsung di BMT KCS baik bersumber dari pihak pengelola, karyawan ataupun anggota BMT. Data tersebut didapatkan dengan cara interview langsung dengan pihak BMT, dalam hal ini akan diwakilkan oleh manajer BMT yang memahami tentang segala halnya yang terkait dengan operasional BMT. Adapun data penunjang penulisan ini berupa dokumen-dokumen, baik berupa literatur, surat akad dan sumber pendukung lainnya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Beberapa tahun belakangan ini perkembangan ekonomi islam begitu pesatnya, terutama di dunia lembaga keuangan Indonesia. Hal itu bermula di tahun 1998, pada saat itu terjadi krisis moneter yang melanda beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Banyak perbankan di Indonesia yang merasakan dampak dari krisis tersebut hingga mengalami kebangkrutan, lain halnya dengan bank yang bersystem Syariah, bisa bertahan di tengah gejolak krisis ekonomi di

Indonesia. Sejak kasus itu, di Indonesia muncul banyak gagasan untuk pembuatan perbankan dan lembaga keuangan yang bersistem syariah. Dengan berjalannya waktu hingga kini, telah banyak berdiri perbankan maupun Lembaga keuangan Syariah yang berskala besar maupun yang kecil. BMT (Baitul maal waa tamwil) merupakan salah satu contoh bentuk Lembaga keuangan Syariah (LKS) yang berskala kecil atau mikro. Keberadaan BMT ini sangat membantu bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat terpendek.

BMT hadir ditengah masyarakat dengan membawa dampak positif lembaga keuangan syariah meskipun hanya berskala kecil, keberadaannya bisa membantu menggerakkan perekonomian masyarakat dengan menerapkan sistem syariah yang mana masyarakat kita yang mayoritas muslim. Seakan angin segar yang bertiup kepada pelaku ekonomi/pengusaha/pedagang yang ingin menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan tanpa harus terjerat dengan sistem ribawi.

Namun beberapa kenyataan di lapangan kerap ada yang tak sesuai dengan harapan, kerap kali BMT tertentu tidak/belum bisa menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus ini, akad mudharabah merupakan akad yang penerapannya kerap ditemukan belum sesuai dengan aturan Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Salah satu contoh “pelanggaran” pelaksanaan akad mudharabah oleh BMT tertentu yakni pada penentuan nisbah bagi hasil antara anggota pembiayaan dengan pihak BMT, menurut teori yang ada tentang mudharabah penentuan besaran bagi hasil merupakan hasil musyawarah antara kedua belah pihak yang melakukan akad mudharabah. Namun pada praktiknya di beberapa BMT tersebut, tidak terjadi negosiasi antara pihak BMT dengan nasabah tentang nisbah bagi hasilnya.

Jika kita melihat pengertian mudharabah itu sendiri, Mudharabah ini disebut juga dengan qirad atau muqaradah yang artinya al-qath'u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan oleh pengusaha dan memperoleh sebagian keuntungan. Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedang pihak lain sebagai pengelola (mudharib). Keuntungan usaha

secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan dua pihak yang dituangkan dalam akad (kontrak), jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal (shahibul mal), selagi kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola (mudharib). Jika kerugian itu akibat kecurangan atau kelalaian si pengelola (mudharib), maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁴

Jika kita melihat mengenai prosedur BMT KCS yang penulis teliti pada penulisan ini, sosialisasi produk merupakan langkah pertama yang diambil BMT guna mendekati masyarakat, kemudian apabila ada (calon anggota) yang tertarik dengan produk yang ditawarkan dan ingin melakukan kerjasama pembiayaan, Tindakan selanjutnya adalah pihak BMT mensurvey kondisi ekonomi dan jaminan dari calon anggota,

Pembiayaan dalam akad mudharabah di BMT KCS dilakukan dengan bentuk pembiayaan rekening koran atau pembiayaan jatuh tempo dengan jangka waktu maksimal 3 bulan. Nisbah bagi hasil diperoleh dari kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan yang ditentukan berdasar pada hasil survey keadaan usaha dan data keuangan usahanya. Kemudian, dilakukan estimasi keuntungan yang akan didapat dalam mudharabah ini. Setelah estimasi keuntungan ditemukan, barulah disepakati nisbah bagi hasil antara kedua pihak.

Adapun penggunaan jaminan dalam akad mudharabah pada sebagian kalangan menerima dan sebagian yang lain menolak, mengingat mudharabah merupakan akad kerjasama bukan jual beli (murabahah). Akan tetapi dalam hal ini, pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia memiliki sumber aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan, yakni DSN MUI. Dalam hal ini DSN MUI dalam FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) dalam salah satu ketentuan pembiayaan tertulis bahwa *pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat*

¹⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 190.

meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Dari penilitan di atas maka bisa disimpulkan bahwa penerapan akad mudharabah di BMT KCS dilihat dari sudut pandang hukum islam sudah sesuai penerapannya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas yang merupakan ulasan dari pokok masalah penulisan skripsi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: penerapan akad mudharabah oleh BMT KCS sudah sesuai dengan hukum islam yang dilihat dari, Kesesuaian dalam hal pemenuhan rukun dan syarat mudharabah bagi calon anggota yang di tentukan oleh pihak BMT berdasar pada aturan yang berlaku dan bersumber dari hukum islam.

Kemudian hal lainnya juga, Penentuan keuntungan yang di terapkan pada BMT dengan cara bagi hasil dari nilai keuntungan yang di dapat, serta besaran bagi hasil tersebut di tentukan dalam nisbah yang di sepkatai Bersama di awal pembuatan akad. Hal itu sudah sesuai dengan hukum islam.

Ada pun Penggunaan jaminan yang dilakukan oleh pihak BMT ditujukan guna mengantisipasi jika mudharib melakukan kesalahan atau pelanggaran yang telah di sepakati dalam akad, dan penggunaan jaminan ini di perbolehkan dalam hukum islam dengan merujuk pada fatwa DSN MUI NO 07/DSN-MUI/IV/2000.

4.2 Saran

Dari penulisan di atas, penulis memberikan saran kepada pihak BMT KCS agar Melakukan evaluasi secara berkala pada penerapan dan keberlangsungan akad (mudharabah), guna tercapainya peningkatan layanan dan produk sehingga bisa menjadi lebih baik lagi.

Kemudian, adanya Pemberian pelatihan/edukasi mengenai laporan keuangan dan pembuatan nya kepada calon anggota yang belum/tidak bisa

membuat laporan keuangan sebelum melakukan akad mudharabah, sehingga kedepannya membuat kemudahan dan kejelasan bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Sudarsono, Heri. (2013). *bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Iliustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia

Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press

fatwa DSN MUI NO 07/DSN-MUI/IV/2000. Tentang jaminan dalam akad mudharabah

fatwa DSN MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang mudharabah.2017.
Jakarta Pusat: DSN-MUI.